



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DIAN OKTA YOSHINTA**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **737424**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **3.378.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 306 m2/306 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 3.005.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/198 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1.107 m2/1.107 m2 di KAB / KOTA LAMONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1.382 m2/1.382 m2 di KAB / KOTA LAMONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1.390 m2/1.390 m2 di KAB / KOTA LAMONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 312 m2/312 m2 di KAB / KOTA LAMONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 15.500.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 48.800 m2/48.800 m2 di KAB / KOTA BATU BARA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **845.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA VENTURER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 415.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. **3.149.090.118**

D. SURAT BERHARGA

Rp. **2.050.000.000**

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. **1.037.179.864**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 10.459.769.982

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 10.459.769.982

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.